

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak atas pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1). Memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan bermutu merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) merupakan instrumen krusial untuk mencapai *Universal Health Coverage (UHC)*, yang berarti bahwa setiap orang dilindungi secara finansial dari bahaya biaya kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Namun demikian, masih ada beberapa kendala yang menghalangi pelaksanaan JKN-KIS di berbagai wilayah. Administrasi, kepesertaan ganda, keterlambatan aktivasi card, atau bahkan tidak terdaftar sebagai peserta aktif adalah masalah yang sering menghalangi komunitas (Calundu, R. (2025). Akibatnya, layanan kesehatan yang cepat dan efektif masih belum tersedia bagi sebagian masyarakat. Dalam situasi ini, ada inovasi kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat akses layanan kesehatan.

Pada dasarnya, program bantuan kesehatan daerah ini untuk menyederhanakan layanan kesehatan, pasien membutuhkan perawatan hanya perlu menunjukkan KTP Kota Batam tanpa perlu membawa dokumen tambahan seperti BPJS Kesehatan. Menurut (Pertiwi, 2023), pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar pelayanan publik yang baik, seperti kemudahan akses, efektivitas pelayanan, dan efisiensi administratif. Oleh karena itu, inovasi ini diharapkan dapat membantu sistem jaminan kesehatan nasional di tingkat daerah sekaligus mencapai tujuan kesehatan

inklusif. Sebagai pusat ekonomi yang berkembang di Indonesia, Kota Batam memiliki dinamika sosial dan kependudukan yang kompleks (Rengga Yuliandra, 2025).

Apa hubungan JKN-KIS dengan program bantuan kesehatan daerah Kota Batam? Tingkat partisipasi masyarakat Batam dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 1.303.254 jiwa atau sekitar 95,65% penduduk Kota Batam telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS (Post, 2025). Selain segmen PPU, ada juga peserta mandiri yang membayar iuran secara pribadi, baik di kelas 1, 2, dan 3. Bahkan peserta dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Angka ini fluktuatif karena disesuaikan dengan kemampuan fiskal Pemerintah daerah (Pemko Batam) setiap bulannya (Studi et al., 2024).

Tabel 1.1. Data Peserta JKN-KIS di Kota Batam.

No	Jenis Kepesertaan	Jumlah Peserta (Jiwa)
1	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI- JK)	321.547
2	Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU- Pemda)	86.427
3	Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU- BU)	565.079
4	Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU- PN)	74.947
5	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	276.544
6	Bukan Pekerja (BP)	6.164
Total Peserta JKN		1.330.708
Jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2025		1.365.266
Persentase Peserta JKN-KIS		97,47%

Sumber: Aplikasi BI BPJS Kesehatan (Capaian UHC Per Tanggal 30 September 2025) (Data Olahan Peneliti, 2025).

Berdasarkan data yang tercatat dari BPJS Kesehatan Tahun 2025, total jumlah peserta JKN-KIS di Kota Batam, yaitu: 1.342.038 jiwa dari total penduduk, yaitu: 1.365.266 jiwa pada semester 1 Tahun 2025. Dengan demikian, tingkat cakupan kepesertaan JKN-KIS telah mencapai 97,47%, yang menunjukkan hampir seluruh penduduk Kota Batam telah terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika dilihat berdasarkan jenis kepesertaan, kelompok dengan jumlah peserta terbesar adalah, yaitu: sebanyak 565.079, atau sekitar 42,46% dari total peserta JKN. Hal ini menggambarkan bahwa dominasi kepesertaan berasal dari sektor formal swasta yang aktif mengikuti program jaminan kesehatan melalui badan usaha masing-masing. Selanjutnya, Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK) menempati urutan kedua dengan 321.547 jiwa (sekitar 24,17%). Peserta kategori ini adalah masyarakat yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, mencerminkan peran negara dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, peserta mandiri berjumlah 276.544 jiwa (20,78%), yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sektor informal juga mulai sadar akan pentingnya perlindungan kesehatan. Adapun kategori, Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN) sebanyak 74.947 jiwa (5,63%), PBU Pemda (86.247 Jiwa / 6,49%), dan Bukan Pekerja (BP), sebanyak 6.164 Jiwa (0,46%). Menjadi kelompok dengan kontribusi lebih kecil namun tetap signifikan dalam keseluruhan cakupan.

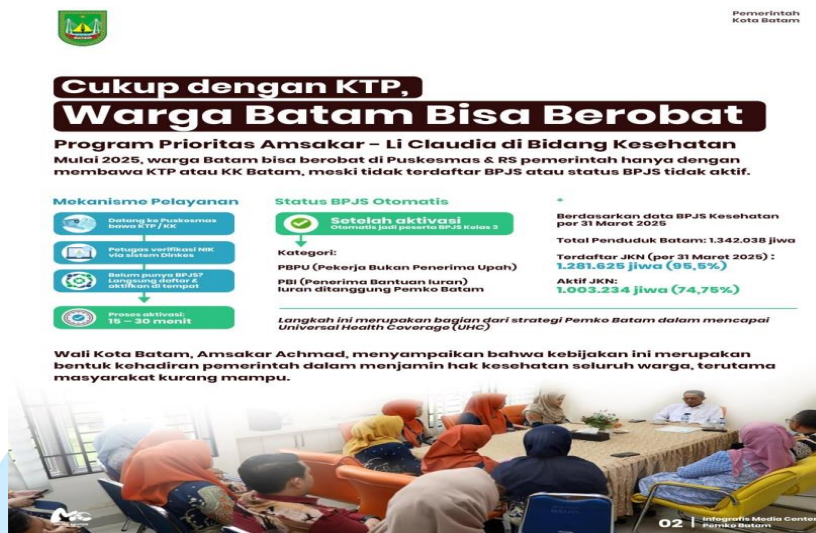
Tabel 1.2. Data Status Keaktifan Peserta JKN-KIS di Kota Batam.

No	Jenis Kepesertaan	Jumlah Peserta (Jiwa)
1.	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)	285.315
2.	Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU PEMDA)	77.141
3	Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU)	463.093
4.	Pekerja Penerima Upah Penerima Negara (PPU-PN)	72.672
5.	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU)	179.429
6.	Bukan Pekerja (BP)	5.581
Total Peserta Aktif		1.083.231
Peserta Non-Aktif		247.477
Total Peserta JKN-KIS		1.330.708
Jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2025		1.365.266
Persentase Keaktifan Peserta JKN-KIS		79,34%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Batam pada semester 1 Tahun 2025, sebanyak 1.330.708 orang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari total penduduk 1.365.266 orang (BPS Kota Batam, 2025). Dengan 463.09 anggota, atau sekitar 42,7% dari total peserta aktif, kelompok Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) memiliki jumlah peserta terbesar. Di antara anggota kelompok ini, adalah karyawan sektor formal yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Namun, dengan 285.315 orang (26,3%), kelompok Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) menempati urutan kedua. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa orang berpenghasilan rendah dapat memperoleh jaminan kesehatan.(Faiz et al., 2025).

Gambar 1.1 Cukup Dengan KTP Warga Batam Bisa Berobat

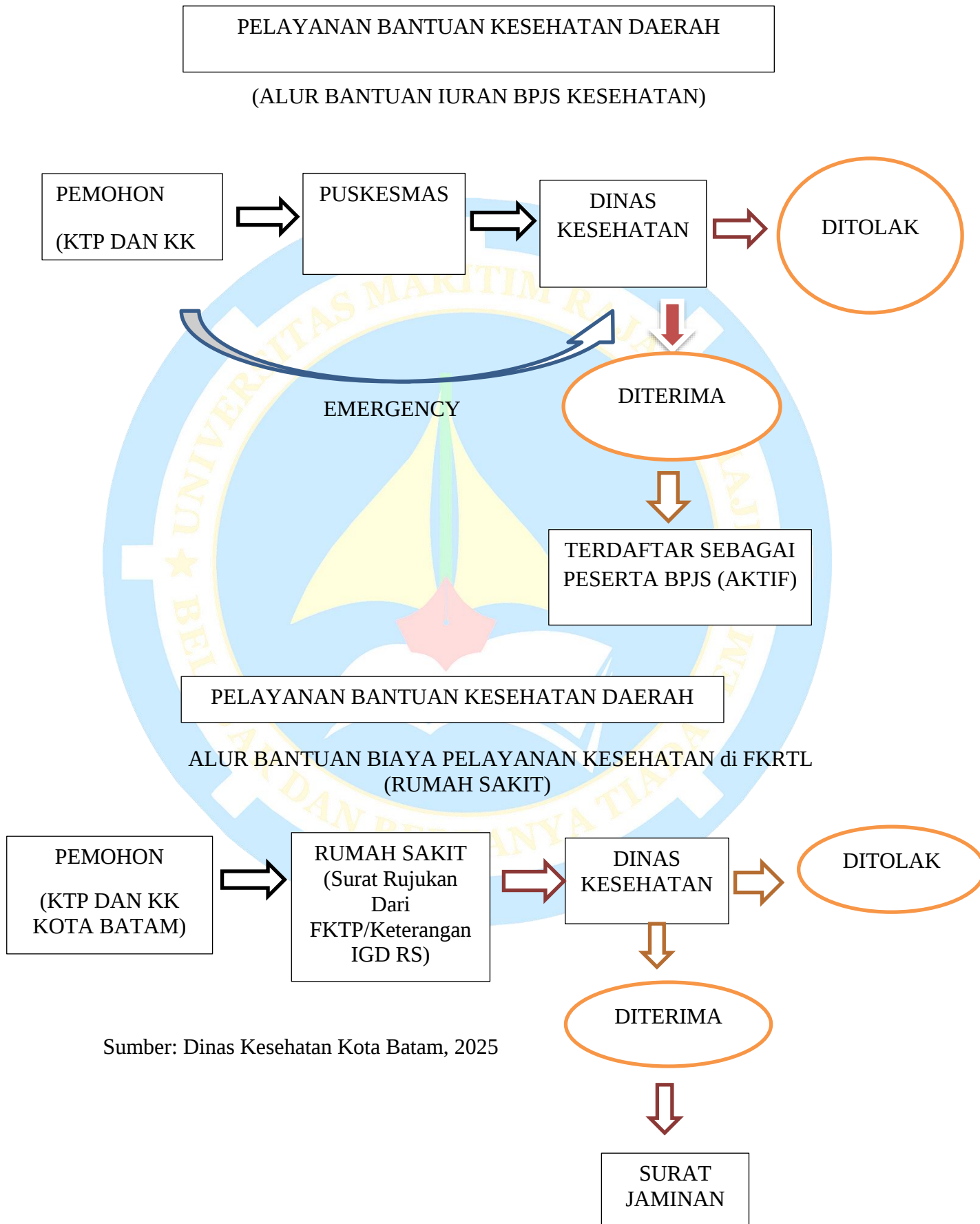


Sumber: Diskominfo Kota Batam

Nama program bantuan kesehatan daerah Batam, yaitu: pengobatan secara gratis untuk masyarakat kota Batam. Dalam mekanisme pembiayaan berobat menggunakan KTP Kota Batam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kota Batam yang menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 26 miliar dalam APBD-P, sehingga total anggaran untuk program Bantuan Kesehatan tahun 2025 mencapai Rp 79 miliar. Dana tersebut mencakup biaya layanan rumah sakit yang tidak ditanggung BPJS dan bantuan rujukan ke luar provinsi bagi warga tidak mampu. Proses aktivasi kepesertaan BPJS cukup dilakukan melalui puskesmas. Dasar hukum yang mengatur program berobat menggunakan KTP Kota Batam, yaitu: Peraturan Wali Kota Batam No. 32 Tahun 2025 Tentang Bantuan Kesehatan Daerah. Petugas akan menginput data secara daring ke Dinas Kesehatan yang kemudian memverifikasi NIK melalui portal kependudukan, Jika sesuai, aktivasi akan dilakukan selama 10-15 menit.

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan pelayanan publik yang inklusif, cepat, dan bebas hambatan. Melalui program Bantuan Kesehatan Daerah maupun Dinas Kesehatan Kota Batam. Mekanisme ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum terdaftar atau mengalami kendala administrasi dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Dengan sistem berbasis NIK tersebut, data penduduk dapat langsung terhubung dengan sistem kepesertaan kesehatan, sehingga proses berobat dengan KTP juga mencerminkan komitmen pemko Batam untuk mencapai *Universal Health Coverage (UHC)*, yaitu dimana kondisi semua orang memiliki akses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Langkah ini sejalan dengan pemerintah daerah untuk menjadikan Batam sebagai kota modern dan inklusif yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas pembangunan. Selain memperkuat sektor pelayanan kesehatan, program ini juga berdampak sosial-ekonomi dengan menekan angka pengeluaran rumah tangga untuk biaya berobat serta meningkatkan rasa aman masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dasar (Indrayani, 2020).

Gambar 1.2 Alur Layanan Menggunakan JKN-KIS Kesehatan



Berdasarkan pemaparan di atas karena itu, penulis ingin meneliti akses kesehatan masyarakat di Kota Batam. Oleh karena itu, penelitian akan mengkaji langkah-langkah yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, bahkan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan layanan akses kesehatan masyarakat di Kota Batam dengan judul: **“Efektivitas Program Bantuan Kesehatan Daerah Dalam Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan utama yang akan dikaji, yaitu: Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Kesehatan Daerah Dalam Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Kota Batam Tahun 2025?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Efektivitas Program Bantuan Kesehatan Daerah Dalam Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Kota Batam Tahun 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang langkah-langkah yang dilakukan serta kontribusi Dinas Kesehatan memastikan dalam meningkatkan akses kesehatan masyarakat dengan baik setelah mengalami kendala dalam administrasi pendaftaran berobat (Natalina Nilamsari, 2014)

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membantu yang berarti, baik secara aspek teoritis maupun pragmatis, khususnya dalam memahami Efektivitas Program Bantuan Kesehatan Daerah Dalam Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Kota Batam Tahun 2025. Menurut Gunawan & Hasanah (2019).

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta memperkaya kajian ilmiah tentang efektivitas Dinas Kesehatan dalam meningkatkan akses kesehatan masyarakat di Kota Batam. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, bahkan pihak-pihak yang tertarik dalam studi pelayanan publik dan layanan akses kesehatan, khususnya dalam efektivitas program bantuan kesehatan daerah di Dinkes Kota Batam ((Rashid, 2022).

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Batam

Penelitian ini dapat digunakan untuk menilai dan membangun kebijakan kesehatan di daerah. Pemko Batam dapat menilai seberapa efektif program “Bantuan Kesehatan Daerah.” Selain itu, hasil penelitian dapat berfungsi sebagai dasar keputusan untuk meningkatkan sistem pelayanan berbasis identitas tunggal (NIK), meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, dan memperluas kerja sama dengan lembaga kesehatan pemerintah dan swasta. Studi ini juga membantu pemko memahami hambatan lapangan (seperti: administrasi, SDM, dan sosialisasi) yang perlu diperbaiki agar pelayanan lebih cepat, tepat, dan inklusif (Irmayanti, S.Pd., 2023).

b. Bagi Dinas Kesehatan Kota Batam

Penelitian ini memberikan informasi empiris tentang pelaksanaan program di tingkat teknis, seperti bagaimana prosedur pendaftaran berjalan, bagaimana fasilitas kesehatan berkolaborasi, dan seberapa puas pasien. Untuk memastikan bahwa masyarakat tidak tertinggal dalam jaminan kesehatan, hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di rumah sakit dan puskesmas, dan memperkuat sistem data kepesertaan. Studi ini juga digunakan oleh Dinkes sebagai sumber monitoring dan evaluasi (*Monev*) untuk mengukur capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan, termasuk seberapa besar pengaruh program terhadap penurunan angka keluhan atau kelalaian pelayanan medis.

c. Bagi DPRD Kota Batam

Bagi Dewan Perwakilan Daerah, temuan penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi ilmiah dan dasar pengawasan untuk pelaksanaan kebijakan daerah di sektor kesehatan. Penelitian ini dapat membantu DPRD menilai efektivitas anggaran dan kinerja eksekutif, khususnya terkait pembiayaan layanan kesehatan KTP Kota Batam. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam pembentukan atau revisi peraturan daerah yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat. DPRD dapat memperjuangkan kebijakan kesehatan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, bahkan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan data dan analisis yang kuat.

d. Bagi Masyarakat Kota Batam

Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan berobat, masyarakat secara langsung mendapatkan keuntungan. Mereka tidak perlu khawatir tentang kepemilikan kartu BPJS aktif kendala administrasi lainnya. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang hak mereka atas layanan kesehatan dasar dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data kependudukan yang akurat. Selain itu masyarakat melihat perhatian nyata terhadap kebijakan pemerintah daerah (Meutia,2017).

